

BOOK REVIEW

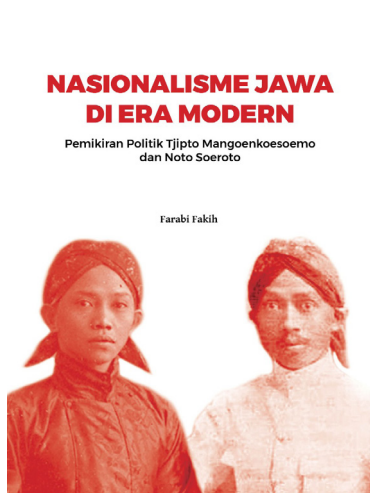
Nasionalisme Jawa di Era Modern: Pemikiran Politik Tjipto Mangoenkoesoemo dan Noto Soeroto

Ryan Adi Parameswara

Departemen Sejarah, Universitas Gadjah Mada
ryanadiparameswara@mail.ugm.ac.id

Nasywa Naurah Alawal

Departemen Sejarah, Universitas Gadjah Mada
nasywanaurahalawal@mail.ugm.ac.id



Judul

Nasionalisme Jawa di Era Modern: Pemikiran Politik Tjipto Mangoenkoesoemo dan Noto Soeroto

Penulis

Farabi Fakhri

Penerbit

Penerbit Terang

Halaman

xvi+176 halaman

ISBN

978-602-51805-7-6.

Narasi tentang historiografi pergerakan nasional sering kali ditulis secara linear seolah-olah berlangsung melalui satu koridor yang berkembang secara teleologis. Namun, kenyataan sejarah menunjukkan bahwa ada nilai-nilai nasionalisme lain yang muncul pada masa awal pergerakan kemerdekaan. Velde (2005: 205–221) menjelaskan proliferasi tersebut disebabkan arus pertukaran gagasan politik dan budaya dari berbagai tempat di dunia. Hal ini, dalam konteks Indonesia awal abad XX, mendorong muncul dan berkembangnya berbagai spektrum politik, mulai dari Nasionalisme Jawa hingga komunisme. Di dalam buku ini, Farabi Fakhri menunjukkan nasionalisme Jawa sebagai bentuk pemikiran nasionalisme pertama yang muncul di kalangan bumiputra. Gagasan ini lahir sebagai bagian dari teosofisme-politik yang diminati oleh kelas atas Jawa pada awal abad XX.

Nasionalisme Jawa dinilai sebagai bentuk transformasi dari tradisi Jawa prakolonial yang dibalut dengan konsep pemikiran modern agar lebih mudah diterima masyarakat saat itu. Tjipto Mangoenkoesoemo dan Noto Soeroto merupakan dua tokoh pada masa pergerakan kemerdekaan yang memiliki pemikiran bernapaskan nasionalisme Jawa. Namun, mereka berdua memiliki pandangan yang berseberangan.

Secara politis, Tjipto lebih agresif dan dikategorikan sebagai salah satu nasionalis Indis di satu sisi juga pejuang masyarakat akar rumput layaknya Boedi Oetomo di sisi yang lain. Sementara itu, Noto Soeroto merupakan seorang aristokrat sejati lebih bersifat elitis dan pergerakan politiknya cenderung “lunak” terhadap pemerintah kolonial.

Perbedaan karakteristik pemikiran Tjipto dan Noto tidak lepas dari latar belakang masing-masing tokoh yang sangat berbeda. Tjipto merupakan priayi Jawa kelas menengah yang dilahirkan di Jepara, daerah pesisir Utara Jawa. Secara psikis, orang-orang pesisiran dinilai lebih kosmopolitan (Triyanto, dkk., 2019: 69). Hal ini sangat mungkin mempengaruhi pemikiran Tjipto yang agresif dan mudah menerima hal-hal baru yang ia dapat melalui pendidikan Barat. Sebagai priayi kelas menengah, ia masih berhak menerima pendidikan Eropa sehingga termasuk dalam golongan orang berpendidikan. Tjipto dinarasikan sebagai seorang priayi kelas menengah yang memahami budaya Barat secara agresif, dalam artian dia berusaha menyesuaikan konsep kekuasaan Jawa dengan keinginannya untuk melakukan demokratisasi dan melepaskan diri dari kolonialisme.

Sementara itu, Noto Soeroto memiliki karakteristik pemikiran politik yang lebih elitis karena dilahirkan di lingkungan Kadipaten Pakualaman. Selain menerima pendidikan Barat, Noto mempelajari budaya Jawa secara mendalam karena pendidikan yang didapatnya di Pura Kadipaten. Hal ini berlainan dengan Tjipto yang meskipun priayi, jauh dari pendidikan mengenai budaya Jawa secara mendalam. Noto yang elitis, menilai bahwa melalui pendidikan Barat, Jawa dapat dibimbing pada kemajuan. Namun, di sisi yang lain, ia menolak gagasan tentang demokrasi. Hal ini sejalan dengan latar belakang sosialnya sebagai seorang aristokrat Jawa yang mendasarkan pemikiran politiknya pada konsep kekuasaan Jawa. Jadi implikasi pendidikan Barat oleh kedua tokoh menghasilkan pandangan yang berbeda.

Melalui proyek ilmu pengetahuan kolonial yang dimulai sejak abad ke-19, terjadi perubahan kondisi sosial dan pendidikan bagi para priayi dan aristokrat Jawa. Kesempatan untuk belajar di sekolah-sekolah Belanda dengan menggunakan bahasa Belanda sangat terbuka untuk orang-orang Jawa kalangan atas. Menurut Farabi Fakhri dalam buku ini, keluarga bangsawan, termasuk keluarga Pakualaman, memiliki keinginan kuat untuk mengirimkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah Belanda. Hal itu mereka lakukan karena menyadari betapa pentingnya pendidikan untuk mempertahankan kelas mereka sebagai bangsawan Jawa. Implikasinya, pendidikan lama model pesantren yang ditekuni orang-orang Jawa bergeser dengan pendidikan modern ala Barat.

Kaum intelektual Jawa tradisional yang lazimnya terdiri dari para pujangga telah kehilangan kontrol atas legitimasi mereka sendiri disebabkan oleh diskursus saintifik Eropa yang lebih mapan dan rasional. Kendatipun hanya terjadi pada sebagian kecil masyarakat Jawa, proses ini jelas sangat berpengaruh. Perlahan, kalangan atas Jawa yang sebelumnya memiliki pandangan tradisional Jawa bergeser menuju pandangan modern Barat. Ranggawarsita, sebagai contoh, seorang penyair terakhir Jawa dalam salah satu karyanya, *Serat Kalatidha*, berbicara mengenai Jawa yang dikutuk tidak dapat memahami kekuatan modern sebagai akibat dari hilangnya kekuatan atau tradisi peradabannya. Karya itu menyiratkan bahwa dunia tradisional Jawa sedang dalam kondisi sekarat dan memberikan ruang bagi rasionalisme Barat untuk berkembang.

Etnis Jawa sebenarnya sudah dapat dianggap mampu untuk membentuk rasa kebangsaan dan negara-bangsa sendiri di luar Indonesia, tetapi mereka malah meleburkan diri meneruskan sebuah proyek kebangsaan sipil. Masalah ini sempat disinggung oleh Farabi Fakih dalam pengantar buku ini, ia berpendapat bahwa keputusan etnis Jawa untuk melakukan ‘bunuh diri’ kebangsaan itu merupakan sesuatu yang punya efek panjang. Tradisi kesusastraan Jawa yang sudah ada selama setidaknya satu milenium, sebagai contoh, akan mengalami kematian pasca 1940-an, ketika orang Jawa sendiri berhenti menulis sastra berbahasa Jawa dan mengalihkannya pada sastra berbahasa Indonesia. Ketakutan juga muncul dari kalangan aristokrat Jawa, terdapat perasaan bahwa mereka sedang menuju kejatuhan karena modernisasi birokrasi pemerintahan serta pergeseran menuju negara teknokratis yang semakin hari semakin mengancam. Efek modernitas dikhawatirkan oleh aristokrat di kalangan pemuda Jawa karena pengajaran model Barat akan membuat mereka kekurangan pengetahuan akan budaya Jawa.

Meskipun nasionalisme Jawa tidak dipilih sebagai identitas imajiner pada masa pergerakan kemerdekaan, nilai-nilai Jawa masih diadopsi ke dalam nasionalisme modern pasca-Indonesia merdeka. Hal ini terlihat melalui simbol-simbol kenegaraan yang mencerminkan beragam ikon dan imaji Jawa; mulai dari Garuda, Rupiah, Pancasila, sampai Bhinneka Tunggal Ika, serta perayaan kejayaan Majapahit sebagai salah satu mitos historis negara-bangsa Indonesia. Perayaan terhadap artefak kultural ke-Jawa-an menunjukkan ketertarikan akan kebudayaan dan nasionalisme Jawa yang terus terbina dalam Republik Indonesia merdeka. Farabi Fakih juga memantik sebuah pertanyaan apakah budaya politik Orde Baru sebenarnya telah mengambil beberapa aspeknya dari nasionalisme Jawa di masa akhir kolonial. Obsesi Orde Baru untuk membangun citra bangsa dilakukan melalui perayaan kebudayaan, terutama kebudayaan Jawa, pembangunan fisik, pendidikan di sekolah, serta melalui hubungan Soeharto dan keterlibatannya dalam dunia mistisisme Jawa. Dengan demikian, obsesi Soeharto ini bertindak layaknya Sultan Jawa yang ingin menyatukan keseluruhan Indonesia sebagai perluasan dari ‘Keraton Jawa’-nya. Hal ini mungkin sekali bukan produk dari masa-masa pra kolonial, melainkan sebuah reaksi atas kondisi modern, yang muncul ke permukaan setelah 20 tahun dominasi materialisme historis.

Meskipun telah menjelaskan pandangan Tjipto dan Noto secara komprehensif, tetapi Farabi Fakih tampaknya luput menjelaskan rasionalisasi relasi mereka dengan tokoh lain yang berbeda pandangan. Salah satunya hubungan antara Tjipto dengan Douwes Dekker. Sebab, meskipun dalam buku tersebut Tjipto disebut sebagai seorang nasionalis Indis, dalam banyak hal ia termasuk orang-orang yang memperjuangkan hak masyarakat akar rumput layaknya para tokoh Boedi Oetomo. Berlainan dengan Douwes Dekker pendiri Indische Partij yang meskipun juga menentang kolonial, tetapi lebih menitikberatkan pada pertanyaan rasional mengenai hubungan negara koloni dengan pemerintah kolonial Belanda. Di sisi lain, Indische Partij juga dianggap bersifat elitis karena didirikan oleh seorang Indis dan banyak dari anggotanya yang juga kalangan Indis. (Purwanto, 2021: 165–166). Jawaban yang paling masuk akal mengenai pertanyaan di atas adalah adanya kemungkinan bahwa baik Tjipto maupun Douwes Dekker meminggirkan subjektivitas masing-masing individu sehingga mereka dapat berkolaborasi.

Bagaimanapun, buku ini memiliki arti penting dalam historiografi Indonesia dengan memberi gebrakan besar terhadap narasi besar bangsa yang diingat sebagai memori kolektif masyarakat Indonesia hingga saat ini. Sebab, buku ini menyajikan anomali nasionalisme terutama nasionalisme Jawa yang dalam penulisan sejarah Indonesia saat

ini terpinggirkan atau bahkan tidak pernah diperhatikan. Hal itu membuat buku ini memperkaya pandangan kita terhadap masa pergerakan nasional di samping narasi besar yang telah terbentuk. Bagi pembaca, buku ini memiliki arti penting untuk menambah wawasan mengenai nasionalisme Jawa. Sebuah konsep nasionalisme yang diilhami dengan modernitas serta bangsanya diakui oleh pemerintah kolonial sebagai bangsa yang sudah siap untuk membentuk negara sendiri. Hal inilah yang menarik karena buku ini kemudian menjelaskan mengapa negara yang terbentuk saat ini justru berbentuk kesatuan dan bukan negara Jawa.

Nasionalisme Jawa sebagai anomali pergerakan nasional memiliki dinamika yang kompleks. Munculnya rasionalitas turut andil dalam proses konsepsi nasionalisme Jawa ini. Implikasinya, beberapa aspek dalam budaya Jawa terkikis oleh pengaruh Barat di satu sisi, akan tetapi para aristokrat Jawa berusaha untuk mempertahankan beberapa nilai kultural yang masih dapat disesuaikan dengan modernitas di sisi yang lain. Implikasi yang pertama ini kemudian diikuti oleh keresahan-keresahan priayi Jawa terpelajar karena dunia mistis yang telah melingkupi keberlangsungan hidup nenek moyang mereka selama berabad-abad mulai luntur. Sedangkan implikasi kedua menghadirkan satu konsep nasionalisme yang unik karena diilhami oleh jiwa zaman yang bercorak modern tetapi juga bercampur budaya lokal. Menariknya, dalam beberapa waktu terlihat dinamika politiknya melewati batas jiwa zaman itu sendiri. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya keberagaman pandangan mengenai arah politik nasionalisme Jawa, apakah harus menentang kolonial, ataukah harus berdamai dengan kolonial guna menciptakan masyarakat Jawa yang modern dalam konteks mengikuti perkembangan kebudayaan Barat.

Referensi

Purwanto, Bambang. 2021. “*Ki Hadjar Dewantara, Berpolitik dengan Akal Budi dan Hati Nurani.*” *Patrawidya* 22(2): 159–180.

Triyanto, dkk. 2019. “*Masjid Menara Kudus: Refleksi Nilai Pendidikan Multikultural pada Kebudayaan Masyarakat Pesisiran.*” *Jurnal Imajinasi* 13 (1): 69–76.

Velde, te Henk. 2005. “*Political Transfer: An Introduction.*” *European Review of History*, Vol 12: 205–221.